EVALUASI PROGRAM CENTRAL SULAWESI REHABILITATION AND RECONSTRUCTION PROJECT OLEH PEMERINTAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Farhan Rahmatullah

NPP. 33.0878

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: farhan.rahmatullah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Nunung Royani, MM

Email: nunung.royani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The earthquake, tsunami, and liquefaction disaster that struck Palu City on September 28, 2018 caused damage to 42,864 housing units, yet the Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) implemented by the Palu City Government has not been comprehensively evaluated against the four CIPP dimensions, leaving a gap between the official satisfactory rating and documented field conditions.* ***Purpose:*** *This study aims to evaluate the implementation of the CSRRP program by the Palu City Government using Stufflebeam's CIPP evaluation model.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through semi-structured interviews, observation, and documentation at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Palu City. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model supported by NVivo software.* ***Result:*** *In the Context dimension, the program showed high relevance to real community needs. The Input dimension revealed weaknesses in the delayed issuance of local technical regulations and limited BPBD human resource capacity. The Process dimension identified four main obstacles: land disputes, complexity of beneficiary data verification, absence of basic infrastructure, and an eight-month delay in Phase 2 tendering. In the Product dimension, physical realization reached 92.65 percent or 4,767 of 5,145 units, with 378 units remaining unfinished.* ***Conclusion:*** *CSRRP was implemented with high achievement but not fully complete. Five strategic efforts are recommended: completing*

remaining housing units, standardizing housing facility audits, strengthening post-occupancy assistance, building an integrated digital data system, and accelerating local technical regulations for future post-disaster recovery programs.

Keywords: CIPP Evaluation, CSRRP, Permanent Housing

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 mengakibatkan kerusakan 42.864 unit rumah, namun program Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu belum pernah dievaluasi secara komprehensif menggunakan keempat dimensi CIPP, sehingga terdapat kesenjangan antara predikat formal yang diberikan dengan kondisi lapangan yang masih menyisakan persoalan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program CSRRP oleh Pemerintah Kota Palu menggunakan model evaluasi CIPP Stufflebeam. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi di BPBD Kota Palu, serta analisis data model Miles dan Huberman berbantuan NVivo. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi Context, program memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan riil masyarakat. Pada dimensi Input ditemukan kelemahan berupa keterlambatan terbitnya regulasi teknis daerah dan keterbatasan kapasitas SDM BPBD. Pada dimensi Process teridentifikasi empat hambatan utama yaitu sengketa lahan, kompleksitas verifikasi data WTB, ketiadaan infrastruktur dasar, dan keterlambatan tender Tahap 2. Pada dimensi Product, realisasi fisik mencapai 92,65 persen atau 4.767 dari 5.145 unit dengan sisa 378 unit belum terselesaikan. **Kesimpulan:** Program CSRRP berhasil dilaksanakan dengan capaian tinggi namun belum sepenuhnya tuntas. Diperlukan lima upaya strategis: penyelesaian sisa unit huntap, standardisasi audit kelayakan huntap, penguatan pendampingan pascahuni, pembangunan sistem pendataan digital terintegrasi, dan percepatan penyusunan regulasi teknis daerah.

Kata Kunci: Evaluasi CIPP, CSRRP, Hunian Tetap

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Indonesia menempati urutan kedua negara paling rawan bencana di Asia setelah Jepang (BNPB, 2024), dengan lebih dari 36.000 kejadian bencana dalam rentang 2015–2024 atau rata-rata 3.600 kejadian per tahun. Posisi geografis di pertemuan tiga lempeng tektonik

besar—Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik—menjadikannya bagian dari cincin api Pasifik (Ring of Fire) dengan 120 gunung berapi aktif dan ribuan aktivitas seismik tahunan (Wulandari, 2021). Salah satu ancaman geologi yang paling destruktif adalah likuefaksi, yaitu perubahan tekstur tanah dari padat menjadi cair akibat tekanan hidrostatik saat gelombang seismik melewati sedimen berbutir jenuh air, yang mampu menelan seluruh bangunan di atasnya dalam hitungan menit (Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia, 2019).

Bencana paling dahsyat dalam dekade terakhir terjadi pada 28 September 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah. Gempa Magnitudo 7,4 memicu tiga fenomena destruktif serentak: tsunami setinggi lima meter dan likuefaksi yang meluluh-lantakkan Kelurahan Petobo (181 hektar, 2.050 unit rusak) serta Perumnas Balaroa (40 hektar, 1.045 bangunan rusak). Berdasarkan laporan BNPB per 30 Januari 2019, total 100.405 unit rumah mengalami kerusakan di empat wilayah terdampak, dengan 42.864 unit di Kota Palu dan 3.673 unit hilang sepenuhnya akibat tertimbun likuefaksi (BNPB, 2019). Penetapan zona merah di kawasan terdampak memaksa ribuan warga tidak dapat kembali ke lokasi asal mereka secara permanen, sebuah konteks yang membedakan bencana ini dari kejadian serupa di Indonesia.

Sebagai respons, Pemerintah Indonesia melalui Bank Dunia meluncurkan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP) dengan pinjaman US$150 juta yang mencakup tiga komponen: rekonstruksi perumahan tahan bencana, rehabilitasi fasilitas publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan (World Bank, 2019). Di Kota Palu, Kementerian PUPR mendapat penugasan membangun 5.145 unit huntap menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) tipe 36. Namun program resmi ditutup pada akhir 2024 dengan 378 unit belum terselesaikan, dan Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa enam tahun adalah waktu penyelesaian yang terlalu lama bagi warga terdampak (Kemenko PMK, 2024). Bank Dunia memberikan predikat Memuaskan (World Bank, 2025), namun SKP-HAM Sulteng (2024) mencatat masih terdapat infrastruktur permukiman yang belum selesai, pendampingan pascahuni yang tidak memadai, dan ratusan warga yang belum mendapatkan haknya—kesenjangan inilah yang mendorong urgensi evaluasi independen berbasis CIPP.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian-penelitian yang ada mengkaji aspek sosial-politik penyediaan huntap (Nursamsir dkk., 2022), implementasi kebijakan dengan teori Edwards III (Mazid, 2023), dan kolaborasi antar-aktor (JSIP UNTAD, 2025), namun belum ada yang mengevaluasi

CSRRP secara komprehensif menggunakan keempat dimensi CIPP (Context, Input, Process, Product) sembari mengintegrasikan data laporan penutupan proyek Bank Dunia (ICR 2025), monitoring Kemenko PMK (2024), dan pemantauan independen SKP-HAM Sulteng (2024). Kesenjangan inilah yang menjadi ruang bagi kebaruan penelitian ini.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk menghadirkan gambaran evaluatif komprehensif berbasis data atas pelaksanaan CSRRP sebagai dasar perbaikan kebijakan program pemulihan pascabencana berskala besar di masa mendatang. Tanpa evaluasi semacam ini, pemerintah kehilangan dasar empiris untuk memahami mengapa program membutuhkan enam tahun dan apa yang perlu diperbaiki dalam program serupa di masa depan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Lima penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan. Bohari dkk. (2022) mengevaluasi pemulihan permukiman Pidie Jaya dengan model CIPP, menemukan aspek konteks relevan namun proses terkendala partisipasi masyarakat rendah. Jailani dkk. (2020) mengkaji rehab-rekon NTB dengan capaian 96 persen namun terdapat keterlambatan waktu. Mazid (2023) meneliti implementasi rehab-rekon Lombok Utara menggunakan teori Edwards III dengan hambatan terbesar pada verifikasi data. Nursamsir dkk. (2022) menganalisis aspek sosial-politik huntap di Kota Palu dengan fokus terbatas. JSIP UNTAD (2025) mengkaji kolaborasi pemerintah di Talise Valangguni. Kelima penelitian tersebut menjadi pembanding langsung dalam sub diskusi temuan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, evaluasi CSRRP menggunakan seluruh empat dimensi CIPP secara terpadu untuk pertama kalinya; kedua, integrasi data terbaru dari ICR Bank Dunia (2025), Kemenko PMK (2024), dan SKP-HAM Sulteng (2024) yang belum digunakan penelitian sebelumnya; ketiga, konteks bencana multidimensi dengan relokasi zona merah permanen yang tidak ditemukan dalam penelitian rehab-rekon pascabencana lain di Indonesia.

1.6. Tujuan

Mengevaluasi pelaksanaan program CSRRP oleh Pemerintah Kota Palu dengan model CIPP Stufflebeam (2007) dan merumuskan upaya strategis untuk mengoptimalkan capaian program tersebut.

II. METODE (5-10%)

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sesuai karakteristik evaluasi program yang membutuhkan pemahaman mendalam dari berbagai perspektif pemangku kepentingan (Sugiyono, 2023; Moleong, 2017). Penelitian dilaksanakan di BPBD Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selama tiga bulan pada tahun 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara semi terstruktur kepada lima informan yang dipilih secara purposive sampling (Simangunsong, 2017): Sekretaris BPBD Kota Palu sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan teknis menyeluruh atas program, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagai pelaksana teknis, dan tiga warga penerima huntap dari kawasan Tondo, Petobo, dan Balaroa sebagai penerima manfaat langsung. Kedua, observasi lapangan di kawasan huntap untuk memperoleh gambaran aktual kondisi hunian. Ketiga, dokumentasi berupa laporan resmi BPBD, Kemenko PMK, dan publikasi SKP-HAM Sulteng.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari pemerintah, pelaksana, dan penerima manfaat) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumentasi). Analisis menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, berbantuan perangkat lunak NVivo. Kerangka evaluasi mengacu pada model CIPP Stufflebeam dan Shinkfield (2007) yang menilai Context, Input, Process, dan Product secara komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Evaluasi program CSRRP disajikan berdasarkan keempat dimensi model CIPP Stufflebeam (2007).

3.1. Context (Konteks)

Dimensi Context menilai relevansi program terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris BPBD, program CSRRP dirancang dari hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang mengidentifikasi 42.864 unit rumah rusak di Kota Palu dengan 3.673 unit tidak dapat dihuni kembali akibat zona merah. Salah satu penerima huntap, Ibu Ayu Anggraini Saputri, menyatakan bahwa kondisi tempat tinggal selama masa pengungsian sangat tidak layak dan kebutuhan akan hunian yang aman dan permanen merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditunda. Penetapan zona merah menjadi konteks paling krusial yang membedakan CSRRP dari program rehab-rekon lain: warga bukan sekadar kehilangan tempat tinggal, melainkan juga kehilangan hak untuk

kembali secara permanen ke lokasi asal. Hasil evaluasi Context menunjukkan relevansi program yang tinggi, sejalan dengan temuan Bohari dkk. (2022) pada program pemulihan Pidie Jaya di mana aspek konteks juga dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pascabencana.

3.2. Input (Masukan)

Dimensi Input menilai kecukupan regulasi, SDM, dan anggaran. Dari sisi regulasi, program ditopang tujuh lapisan regulasi mulai dari UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inpres No. 8/2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, PP No. 21/2008, hingga Perwali Palu No. 7/2022 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Anggaran tersedia secara memadai dari gabungan APBN, APBD, dan pinjaman Bank Dunia US$150 juta.

Namun terdapat dua kelemahan Input yang signifikan. Pertama, Perwali No. 7/2022 baru terbit hampir empat tahun setelah bencana, menyebabkan program berjalan tanpa landasan regulasi teknis kota pada periode 2018–2021. Sekretaris BPBD mengakui bahwa ketiadaan regulasi teknis daerah pada tahun-tahun awal berkontribusi langsung pada lambannya koordinasi lintas instansi. Kedua, kapasitas SDM BPBD dalam menangani verifikasi data WTB berskala besar masih perlu diperkuat, mengingat proses verifikasi harus dilakukan berulang akibat data ganda dan dokumen kepemilikan yang hilang saat bencana. Temuan ini memperkuat penelitian Mazid (2023) yang menemukan kelemahan serupa pada aspek Input program rehab-rekon Lombok Utara.

3.3. Process (Proses)

Dimensi Process menilai pelaksanaan lima tahapan program: penetapan lokasi huntap, verifikasi data WTB, proses konstruksi, serah terima huntap, dan proses penghunian. Lima tahapan berjalan terstruktur namun terhambat oleh empat faktor utama yang terakumulasi menyebabkan keterlambatan sistemik.

Pertama, sengketa lahan di Kawasan Tondo, Talise, dan Balaroa akibat tumpang-tindih klaim Hak Guna Bangunan pihak swasta, hingga memerlukan intervensi langsung Wakil Presiden untuk menetapkan tenggat waktu penyelesaian kepada Wali Kota Palu (Diskominfo Sulteng, 2022). Kedua, kompleksitas verifikasi data WTB yang harus diulang berulang kali akibat data ganda, dokumen kepemilikan hilang saat bencana, dan perubahan status kepemilikan. Ketiga, ketiadaan infrastruktur dasar (jaringan listrik, air bersih, jalan akses) di sejumlah kawasan huntap menyebabkan unit yang telah selesai dibangun tidak dapat

segera dihuni. Keempat, keterlambatan tender Tahap 2 CSRRP yang molor delapan bulan dari rencana, menggeser keseluruhan jadwal pelaksanaan secara signifikan (SKP-HAM Sulteng, 2023).

Akumulasi keempat hambatan tersebut menyebabkan program baru dapat ditutup secara formal pada akhir 2024, enam tahun setelah bencana, jauh melampaui target Inpres No. 10/2018. Temuan ini sejalan dengan Jailani dkk. (2020) yang menemukan keterlambatan waktu serupa pada program NTB 2018, namun kendala di Kota Palu lebih kompleks akibat konteks bencana multidimensi dan keharusan relokasi zona merah permanen.

3.4. Product (Produk)

Dimensi Product menilai capaian fisik dan dampak program. Berdasarkan data resmi BPBD Kota Palu (2025) yang dikonfirmasi dalam wawancara penelitian, realisasi program CSRRP tersaji pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Realisasi Capaian Program CSRRP Kota Palu (per akhir 2024)

No.	Aspek Capaian	Target	Realisasi	%
1	Total unit huntap (Kota Palu)	5.145 unit	4.767 unit	92,65%
2	Huntap Tahap 1 – NSUP-CERC	2.095 unit	2.095 unit	100%
3	Huntap Tahap 2 – CSRRP	3.050 unit	2.672 unit	87,61%
4	Sisa unit belum diselesaikan	–	378 unit	7,35%
5	WTB terealisasi (Padagimo)	9.307 KK	8.525 KK	91,60%

Sumber: BPBD Kota Palu (2025); Kemenko PMK (2024); SKP-HAM Sulteng (2024)

Meski capaian kuantitatif terbilang tinggi, evaluasi produk tidak berhenti di angka. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyatakan bahwa pemulihan masyarakat mulai terasa, terutama UMKM kecil yang mulai beraktivitas kembali, meski diakui tidak sepenuhnya seperti sebelum bencana—sebuah kondisi yang dalam literatur dikenal sebagai partial recovery (Djalante & Garschagen, 2017). Dari sisi kualitas fasilitas, terdapat inkonsistensi antar kawasan: Ibu Fitri menyatakan dapurnya belum tersedia, sementara Ibu Ayu Anggraini Saputri mengonfirmasi unitnya sudah dilengkapi dapur, kamar mandi, dan akses listrik-air. Inkonsistensi ini mengindikasikan perbedaan paket konstruksi antar kontraktor atau penambahan fasilitas dari LSM di luar skema CSRRP. Pak Robert Esaf juga mencatat perubahan positif berupa kepastian hukum kepemilikan rumah melalui sertifikat atas nama sendiri. BPBD Kota Palu menggunakan empat indikator dalam mengukur

keberhasilan program: pemulihan fisik-infrastruktur, pemulihan sosial-ekonomi, ketahanan komunitas melalui Forum PRB, dan tindak lanjut aduan warga (Renstra BPBD Kota Palu, 2021–2026).

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sejalan dengan temuan Bohari dkk. (2022) bahwa dimensi Context program rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia pada umumnya memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pascabencana, penelitian ini menemukan pola serupa pada CSRRP. Namun demikian, relevansi kontekstual yang tinggi tidak serta-merta berbanding lurus dengan capaian realisasi di lapangan. Berbeda dengan temuan Jailani dkk. (2020) pada program NTB yang mencapai 96 persen realisasi, capaian CSRRP sebesar 92,65 persen menunjukkan kendala yang lebih kompleks akibat konteks multidimensi bencana Palu 2018 yang mencakup gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi secara bersamaan. Temuan hambatan sengketa lahan dan verifikasi data dalam penelitian ini turut memperkuat hasil kajian Mazid (2023) dan Nursamsir dkk. (2022), yang menunjukkan bahwa persoalan administratif dan tenurial menjadi titik lemah struktural dalam program rekonstruksi perumahan pascabencana di Indonesia. Temuan ini juga menolak klaim bahwa predikat "Memuaskan" yang diberikan Bank Dunia sepenuhnya mencerminkan kondisi lapangan yang sesungguhnya, sebagaimana telah dikritisi oleh SKP-HAM Sulteng (2024) dan JSIP UNTAD (2025). Peneliti menemukan fenomena konkret berupa sejumlah unit huntap yang tidak segera ditempati setelah selesai dibangun. Berdasarkan observasi langsung di kawasan Petobo dan Tondo, sebagian unit terbengkalai atau tidak dihuni secara konsisten, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai status kepemilikan serta lokasi huntap yang jauh dari pusat mata pencaharian lama para penyintas. Kondisi ini mempertegas bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian konstruksi fisik, melainkan juga oleh kualitas komunikasi program, pendampingan sosial yang berkelanjutan, dan kesesuaian lokasi dengan pola mobilitas ekonomi penyintas. Selain itu, infrastruktur permukiman yang belum rampung saat program secara formal ditutup, khususnya di Kawasan Duyu II dengan 378 unit, menegaskan bahwa penutupan formal sebuah program tidak otomatis berarti penyelesaian yang substantif bagi masyarakat terdampak.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Berdasarkan evaluasi program CSRRP menggunakan model CIPP Stufflebeam (2007), terdapat dua kesimpulan utama yang menjawab dua rumusan masalah penelitian ini.

Pertama, program CSRRP berhasil dilaksanakan dengan capaian tinggi namun belum sepenuhnya tuntas. Dimensi Context memiliki relevansi tinggi karena dirancang dari kebutuhan nyata warga yang tidak dapat kembali ke lokasi asal akibat zona merah pascabencana. Dimensi Input sudah tersedia secara regulasi dan anggaran namun dilemahkan oleh keterlambatan regulasi teknis kota yang baru hadir empat tahun pascabencana dan keterbatasan kapasitas SDM BPBD. Dimensi Process berjalan terstruktur namun terhambat empat faktor: sengketa lahan, kompleksitas verifikasi WTB, ketiadaan infrastruktur dasar, dan keterlambatan tender Tahap 2 delapan bulan, sehingga program baru selesai enam tahun pascabencana. Dimensi Product mencapai 4.767 dari 5.145 unit (92,65 persen) dengan 378 unit belum terselesaikan, dampak positif partial recovery ekonomi, dan kepastian hukum kepemilikan, namun kualitas fasilitas huntap belum seragam dan pendampingan pascahuni belum memadai.

Kedua, lima upaya strategis diperlukan untuk mengoptimalkan capaian: (1) penyelesaian sisa 378 unit dan 782 KK yang belum terlayani dengan tenggat waktu konkret dan tim verifikasi khusus; (2) standardisasi dan audit kelayakan fasilitas huntap di seluruh kawasan mengacu Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; (3) penguatan pendampingan pascahuni melalui pengaktifan Forum PRB di tingkat kelurahan; (4) pembangunan sistem pendataan WTB berbasis digital yang terintegrasi dengan data kependudukan dan pertanahan BPN; dan (5) percepatan penyusunan regulasi teknis daerah paling lambat enam bulan setelah bencana untuk program pemulihan serupa di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini terbatas pada BPBD Kota Palu dan warga penerima huntap di beberapa kawasan, belum mencakup seluruh empat wilayah Padagimo secara menyeluruh. Penelitian lanjutan disarankan untuk membandingkan efektivitas program rehab-rekon berbasis pinjaman luar negeri dengan pembiayaan domestik, serta mengkaji efektivitas Forum PRB dalam membangun ketangguhan masyarakat di kawasan huntap pascabencana.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kepala dan seluruh jajaran BPBD Kota Palu, khususnya Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang memberikan akses data dan wawancara. Terima kasih juga kepada warga penerima huntap di Kawasan Tondo, Petobo, dan Balaroa atas keterbukaan dalam berbagi pengalaman, serta kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Klaten: Nasmedia. ISBN 978-623-155-142-9. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan (Teoritik, Legalistik, Empirik dan Inovatif). Bandung: Alfabeta. https://www.researchgate.net/publication/325120254

Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya. Alfabeta.

Karniawati, N. (2015). Hakikat Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan, 1(2), 205-214.

Ibrahim, A. H., & Supriatna, T. (2019). Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik. Ternate: UMMU Press.

Djalante, R., Garschagen, M., Thomalla, F., & Shaw, R. (Eds.). (2017). Disaster Risk Reduction in Indonesia: Progress, Challenges, and Issues. Cham: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-54465-6. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54466-3

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2003). Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru (Jilid 1 dan 2). Jakarta: PT Rineka Cipta.

Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: Jossey-Bass.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Geneva: UNDRR. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Bilau, A. A., Witt, E., & Lill, I. (2018). Practice Framework for the Management of Post-Disaster Housing Reconstruction Programmes. Sustainability, 10(11), 3929. https://doi.org/10.3390/su10113929

Nursamsir, N., Jamaluddin, I. I., Iqbal, M., & Ismanto, I. (2022). The Social and Political Aspects of Permanent Housing Provision for Earthquake Tsunami and Liquefaction Casualties in Palu City, Central Sulawesi. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 26(2), 85-101. https://doi.org/10.22146/jkap.54013

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Safapour, E., Kermanshachi, S., & Pamidimukkala, A. (2021). Post-Disaster Recovery in Urban and Rural Communities: Challenges and Strategies. International Journal of Disaster Risk Reduction, 64, 102535. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102535

Djalante, R., & Garschagen, M. (2017). A Review of Disaster Trend and Disaster Risk Governance in Indonesia: 1900-2015. In R. Djalante, M. Garschagen, F. Thomalla, & R. Shaw (Eds.),

Disaster Risk Reduction in Indonesia (pp. 21-56). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-54466-3_2

Bohari, A., Bohari, J. A., Puspasari, R., Wilopo, Maarif, S., & Rahardi, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Pemulihan Sektor Permukiman Pasca Bencana dengan Metode CIPP (Studi Kasus Gempabumi Pidie Jaya). Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, BNPB. https://jdpb.bnpb.go.id/

Jailani, M. A., Ali, M., & Hasanah, S. (2020). Implementasi Rehab-Rekon Perumahan Pasca Gempa Bumi Di Nusa Tenggara Barat. Journal of Government and Politics (JGOP), 2(2), 127-140. https://doi.org/10.31764/jgop.v2i2.2812

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako. (2025). Kolaborasi Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pasca Bencana di Talise Valangguni. Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan (JSIP), 1(3), 41-54.

Mazid, M. R. (2023). Implementasi Kebijakan Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: Studi Kasus Lombok Utara. Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya, 6(3), 45-60.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2019). Atlas Zona Kerentanan Likuefaksi Indonesia Tahun 2019. Jakarta: BNPB & PVMBG Kementerian ESDM.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2024). Buku Data Bencana Indonesia Tahun 2024. Jakarta: BNPB. https://dibi.bnpb.go.id

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. (2021). Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Palu Tahun 2021-2026. Palu: BPBD Kota Palu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. (2025). Laporan Progres Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Kota Palu. Palu: BPBD Kota Palu.

Diskominfo Sulteng. (2022). Penyelesaian Sengketa Lahan Hunian Tetap di Kota Palu. https://diskominfosantik.sultengprov.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). Laporan Monitoring Penanganan Sektor Perumahan Pascabencana Sulawesi Tengah. Jakarta: Kemenko PMK. https://www.kemenkopmk.go.id

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Laporan Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Sulawesi Tengah 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Perumahan.

Pemerintah Kota Palu. (2022). Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Palu: Pemkot Palu.

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. (2023). Build Back Bitter: Kegagalan Bank Dunia dan Pemerintah dalam Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana di Sulawesi Tengah. Palu: SKP-HAM Sulteng. https://www.monitoring.skp-ham.org

Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKP-HAM) Sulawesi Tengah. (2024). Laporan Pemantauan Lima Tahun Penyediaan Hunian Tetap Pascabencana di Sulawesi Tengah. Palu: SKP-HAM Sulteng.

World Bank. (2019). Project Appraisal Document: Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (US$150 Million). Washington DC: The World Bank. https://documents.worldbank.org

World Bank. (2025). Implementation Completion and Results Report: Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP). Washington DC: The World Bank.

Wulandari, T. (2021). Indonesia dan Cincin Api Pasifik. detikedu. https://www.detik.com/edu/detikpedia